

# RENCANA KERJA TAHUNAN



## STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM

TAHUN ANGGARAN 2024

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu *"Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya"* maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Batam untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2024.

Demikian RKT Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Batam, Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM

Batam



M. Darwin Syah Putra

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat

persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Batampada Tahun 2024.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Batam adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2019 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Batam tahun 2015-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Batam pada Tahun 2024.

## BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 2.1. Rencana Strategis

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah “**Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya**” serta menetapkan misi :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

### **2.1.2. Tujuan Strategis**

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

### **2.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi

BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayatiperikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
  - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi :
  - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
    - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UnitPengolahan I
    - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negaratujuan
    - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratandaerah tujuan
    - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit
    - Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
    - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
    - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
    - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
  - b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
    - Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil

perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya

- Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan

3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :

- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
- b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

### **2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

#### **2.3.1. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam empat perspektif antara lain :

SS.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

SS.2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

SS.3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

SS.4. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

#### **2.3.2. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja BPPMHKP seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program KIPM Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024				
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM				
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam (sertifikat)	5
		2.	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT SKIPM Batam (produk)	1
		3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	2
		5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	30
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	18
<b>Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84
		8	Unit Kerja yang menerapkan Standar Pelayanan Publik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (Parameter)	1
		10	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup SKIPM Batam (lokasi)	1

		10	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam (Indeks)	86
		12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	82
		13	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		14	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	93,76
		16	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	82
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam (%)	80

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing

produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan di atas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

#### **2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Batam**

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Stasiun KIPM Batam dalam mendukung visi Kementerian Kelautandan Perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Batam untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

**Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 4.299.219.000,-**

**DATA ANGGARAN**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	237.050.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	265.500.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.796.669.000
<b>Total Anggaran SKIPM Batam Tahun 2024</b>		<b>4.299.219.000</b>

## BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2024 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
2. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai KIPM Batam, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan TA 2024 dalam mewujudkan "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*".

